

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, Ali. 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ali, Mohammad D. 2007. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul G. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Prespektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Ash-Shiddieqy, Tengku M. H. 1997. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja. 1981. *Hukum Perkawinan menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Fatchurrahman. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hartanto, J. A. 2015. *Hukum Waris: Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Marzuki, Peter M. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Meliala, Djaja S. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Perangin, Efendi. 2011. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. 1974. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 1991. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Ramulyo, M. I. 1985. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: IND - HILL, CO.
- Reksopradoto, Wibowo. 1978. *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*. Semarang: Itikad Baik.
- Riduan Syahrani dan Abdurrahman. 1986. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Medua Sarana Press.
- Saleh, K. W. 1975. *Uraian Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Ichtiar.
- Satrio, J. 2005. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Roni H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Mamudji, et al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Subekti, R. 1990. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Surakhmad, Winarso. 1978. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: Tarsito.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Pancasilawati, Abnan. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak." *FENOMENA* VI(2):188-189.

C. Internet – Website

Rosyadi, H. I. n.d. "Implikasi Uji Materi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." <http://www.arsip.badilag.net/>. Retrieved Mei 17, 2016 (<http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL/IMPLIKASI%20UJI%20MATERI%20PASAL%2043%20ayat%201%20UU%20No%201%20THN%201974.pdf>).

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2010